



Dosen FKIP Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Ketika Pejabat Terlalu Sering Ngawur, Masyarakat Masuk Mode Autopilot

Ketika pejabat terlalu sering bicara ngawur, masyarakat bukan hanya marah. Mereka bisa lelah, kehilangan percaya, lalu memilih autopilot.

1 hari lalu

Bagikan Artikel Ini

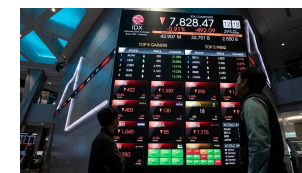


Menyukai Artikel



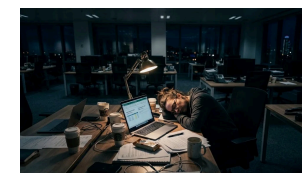
[Nasib Tragis Voli Putra di Asian Games](#)

4 jam lalu



[Menembus Badai IHSG: Seni Berinvestasi Saham di Tengah Dinamika Pasar](#)

4 jam lalu



[Jebakan Hustle Culture: Saat Kerja](#)



Ilustrasi dengan AI

Ada masa ketika pernyataan pejabat yang ngawur membuat masyarakat marah. Pernyataan yang tidak masuk akal, data yang keliru, atau jawaban yang tidak nyambung dengan persoalan publik segera menjadi bahan perbincangan. Sekarang, reaksi itu perlahan berubah. Kita tertawa, membuat meme, mengomentari sebentar, lalu pindah ke kegaduhan berikutnya.

Yang lebih mengkhawatirkan bukan lagi pejabat yang sesekali salah bicara. Yang mengkhawatirkan adalah ketika kesalahan itu terjadi begitu sering sampai masyarakat tidak lagi merasa perlu terkejut. Keganjilan yang berulang dapat berubah menjadi sesuatu yang dianggap biasa. Pada titik tertentu, masyarakat mungkin tidak lagi bertanya, "Mengapa pejabat bisa mengatakan seperti itu?", tetapi cukup berkata, "Ya, namanya juga pejabat."

4 jam lalu



[Jangan Samakan
Identitas dengan
Ancaman](#)

2 jam lalu



[Menembus Badai
Bisnis: Pentingnya
Studi Kelayakan
Sebelum Memulai
Usaha](#)

2 jam lalu

[Lihat semua](#)

Terkini di Pilihan Editor

terhadap institusi yang diwakilinya ikut dipertaruhkan.

Kepercayaan publik sebenarnya bukan sesuatu yang abstrak. Pemerintah membutuhkan kepercayaan agar kebijakan dapat diterima dan dijalankan masyarakat. World Bank menyebut kepercayaan sebagai unsur penting dalam hubungan antara warga dan institusi publik, sementara konsistensi antara apa yang diumumkan pemerintah dan apa yang kemudian dilakukan berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut.

Data menunjukkan bahwa kepercayaan publik di Indonesia belum hilang. Survei Indikator Politik Indonesia pada Mei 2025, misalnya, mencatat tingkat kepercayaan terhadap Presiden sebesar 82,7 persen dan terhadap TNI sebesar 85,7 persen. Namun, pada lembaga lain angkanya lebih rendah; kepercayaan terhadap DPR dan Polri, misalnya, berada di angka 76,3 persen. Angka-angka ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memberikan kepercayaan, tetapi tingkat kepercayaan tersebut berbeda-beda antar-institusi.

Yang perlu diperhatikan adalah bahwa kepercayaan bukan sesuatu yang sekali diperoleh lalu akan bertahan selamanya. Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan perubahan tingkat kepercayaan terhadap sejumlah lembaga dalam periode 2024 hingga awal 2026. Dalam survei Desember 2024, misalnya, tingkat kepercayaan terhadap DPR tercatat 75 persen, sedangkan pada Januari 2026 menjadi 57 persen. Perubahan itu tentu tidak dapat dijelaskan hanya oleh pernyataan pejabat, karena kepercayaan publik dipengaruhi banyak faktor, tetapi ia menunjukkan bahwa kepercayaan publik dapat bergerak secara signifikan.

Ada persoalan lain yang patut diperhatikan. Survei Ipsos Global Trustworthiness Index 2024 menunjukkan bahwa politisi termasuk kelompok profesi dengan tingkat ketidakpercayaan relatif tinggi di Indonesia. Sebanyak 45 persen responden menyatakan tidak percaya kepada politisi, sementara ketidakpercayaan terhadap pejabat kabinet atau kementerian mencapai 41 persen.

[Inflasi Bulan September Terkendali, tapi Dapur Rakyat Terasa Berat](#)

2 jam lalu



[Disleksia Kebijakan Pemimpin Negeri](#)

2 jam lalu



[Parkir Rp20 Ribu di Jogja: Harga Sebuah Ketidakpastian](#)

2 jam lalu



pernyataan pejabat yang tidak kredibel?

Masyarakat belum tentu marah. Justru bisa terjadi sesuatu yang lebih sunyi: masyarakat menjadi lelah.

Kelelahan publik berbeda dengan kemarahan publik. Orang yang marah masih mengikuti persoalan, membaca berita, memeriksa informasi, dan mencari siapa yang bertanggung jawab. Orang yang lelah mungkin memilih berkata, "Sudahlah, paling juga begitu lagi."

Dari sinilah masyarakat dapat masuk ke dalam apa yang saya sebut sebagai mode autopilot. Kehidupan tetap berjalan seperti biasa, tetapi perhatian terhadap urusan publik perlahan ditinggalkan. Orang tetap bekerja, anak tetap sekolah, tagihan tetap dibayar, tetapi persoalan tentang bagaimana negara dikelola semakin dianggap sebagai sesuatu yang tidak perlu dipikirkan terlalu dalam.

Ini bukan berarti masyarakat Indonesia sudah menjadi masyarakat yang apatis. Data tidak menunjukkan kesimpulan sesederhana itu. Namun, kecenderungan untuk menjauh dari persoalan publik patut diwaspadai ketika masyarakat merasa bahwa memperhatikan, mengkritik, atau mempertanyakan kebijakan tidak lagi menghasilkan perubahan.

Masalahnya, apatisisme tidak membuat persoalan negara berhenti. Kebijakan tetap dibuat. Anggaran tetap dibelanjakan. Peraturan tetap diterbitkan. Keputusan pemerintah tetap memiliki konsekuensi terhadap kehidupan masyarakat, termasuk mereka yang memilih tidak mengikuti perdebatan politik.

Di sinilah ironi *autopilot* muncul. Ketika warga tidak lagi mau memperhatikan, keputusan publik tetap berjalan tanpa menunggu perhatian mereka. Orang boleh tidak tertarik pada politik, tetapi politik dan kebijakan publik tetap menarik pada kehidupan mereka.

[Gelar Pahlawan bagi Wartawan Peliput Anak Krakatau](#)

2 jam lalu

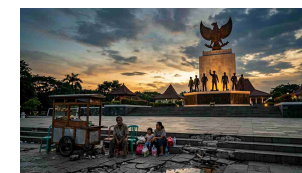


[Politik Selalu Mengalir dalam Darah Para Wanita](#)

21 jam lalu

[Lihat semua](#)

Terpopuler di Pilihan Editor



[Pancasila Sakti di Monumen, Rapuh](#)



dicurigai hanya karena sumbernya sudah dianggap tidak kredibel.

Di era media sosial, persoalan itu menjadi semakin rumit. Penelitian ISEAS-Yusof Ishak Institute tentang Pemilu 2024 menunjukkan bahwa media sosial dan aplikasi pesan menjadi sumber informasi politik yang penting, tetapi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media sosial secara umum lebih rendah dibandingkan beberapa sumber informasi lain. Artinya, masyarakat hidup dalam ruang informasi yang sangat ramai, tetapi keramaian informasi tidak otomatis menghasilkan kepercayaan.

Kita akhirnya berhadapan dengan paradoks. Informasi semakin banyak, tetapi kepercayaan belum tentu bertambah. Pernyataan pejabat semakin cepat tersebar, tetapi koreksinya belum tentu memperoleh perhatian yang sama. Sebuah klaim dapat menjadi viral dalam hitungan menit, sementara penjelasan mengenai mengapa klaim tersebut keliru mungkin hanya dibaca oleh sebagian kecil masyarakat.

Karena itu, persoalannya bukan sekadar apakah seorang pejabat pernah salah bicara. Manusia memang bisa salah. Pejabat juga bisa keliru membaca data, salah menyampaikan informasi, atau memberikan jawaban yang tidak tepat.

Yang lebih penting adalah apa yang terjadi setelah kesalahan itu. Apakah pejabat mengakui kesalahannya? Apakah data diperbaiki? Apakah institusi memberikan penjelasan? Apakah media terus mengikuti persoalan tersebut, atau hanya mengejar kegaduhan sesaat?

Negara yang sehat bukan negara yang pejabatnya tidak pernah salah. Negara yang sehat adalah negara yang memiliki mekanisme koreksi ketika pejabat melakukan kesalahan. Kesalahan dapat terjadi, tetapi kesalahan yang dikoreksi dengan terbuka justru dapat menjadi bagian dari proses membangun kepercayaan.



[Menarik Investasi Hijau Melalui Skema Nilai Ekonomi Karbon](#)

3 hari lalu



[Ijazah Dipertanyakan, Kredibilitas Dipertaruhkan](#)

5 hari lalu



[Inflasi Bulan September](#)



Media juga memiliki tanggung jawab. Pernyataan pejabat yang aneh memang menarik sebagai berita, tetapi pekerjaan jurnalistik tidak berhenti pada membuatnya viral. Media perlu memeriksa data, memberikan konteks, dan mengikuti perkembangan setelah pernyataan tersebut dikoreksi atau dipertanyakan.

Masyarakat pun tidak boleh menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada pemerintah dan media. Kita membutuhkan kebiasaan sederhana: tidak langsung percaya, tetapi juga tidak langsung menolak. Periksa sumbernya, lihat datanya, bandingkan dengan informasi lain, kemudian ambil sikap.

Kritis tidak berarti harus marah setiap hari. Kritis berarti masih memiliki kemauan untuk bertanya.

Begitu pula, tidak peduli bukan berarti bebas dari dampak. Orang yang tidak mengikuti politik tetap akan membayar pajak, menggunakan sekolah, melewati jalan, menerima layanan kesehatan, dan hidup di bawah peraturan yang dibuat negara. Tidak ada tombol *skip* untuk kebijakan publik.

Karena itu, mungkin kita perlu berhenti menertawakan setiap pernyataan pejabat yang ngawur hanya sebagai hiburan. Sese kali kita perlu bertanya lebih jauh: mengapa pernyataan seperti itu bisa muncul, bagaimana kesalahannya dikoreksi, dan apa yang terjadi jika pola tersebut terus berulang?

Sebab masalah terbesar bukan ketika seorang pejabat mengatakan sesuatu yang ngawur. Masalahnya adalah ketika masyarakat terlalu sering mendengarnya sampai akhirnya berhenti bertanya.

Negara tidak runtuh hanya karena satu pejabat salah bicara. Namun, negara dapat menjadi rapuh ketika kesalahan yang berulang membuat masyarakat kehilangan alasan untuk percaya, kehilangan energi untuk mengawasi, dan akhirnya memilih hidup dalam mode autopilot.

2 jam lalu



[Disleksia Kebijakan
Pemimpin Negeri](#)

2 jam lalu

[Lihat semua](#)

Sebab ketika warga berhenti bertanya tentang bagaimana negara berjalan, negara akan tetap berjalan.

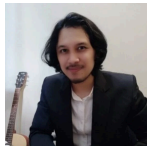
Pertanyaannya kemudian sederhana: siapa yang memastikan kita masih berada di arah yang benar?

[#pejabat](#)

Bagikan Artikel Ini



Menyukai Artikel 0



Apri Damai Sagita Krissandi
Universitas Sanata Dharma

6 Pengikut

+ Ikuti Penulis



Ketika Pejabat Terlalu Sering Ngawur,



Jika Makanan Negara Membahayakan Anak,

Lihat Semua Artikel

Baca Juga



[Ikhsan Lubis](#)

[Penulis Indonesiana, Dosen dan Praktisi di bidang...](#)

[Implementasi Prinsip Ius Collegium dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris](#)

[Penulis Indonesiana, Dosen dan Praktisi di bidang Kenotariatan - Kamis, 8 Januari 2026 19:25 WIB](#)

[Ius collegium memperkuat tugas notaris melalui kolegialitas sejawat guna menjaga kualitas akta, integritas profesi...](#)



1



[Dian Basuki](#)

[Penulis Indonesiana](#)

[Ketika Kuasa Mengubah Watak](#)

[Penulis Indonesiana - Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB](#)



Artikel Terpopuler



[Putri Artika](#)

[Penulis Indonesiana](#)

[Bolosego: Ruang Publik, Tarif Privat](#)

[Penulis Indonesiana - 16 jam lalu](#)

[Di sinilah pertanyaan pentingnya muncul: siapa yang sebenarnya memiliki kewenangan menentukan biaya penggunaan ruang di Alun-Alun Kidul? ...](#)



[Santri Bakiak](#)

[Penulis Indonesiana](#)

[Denting Anggur Savoyard di Mont-Blanc Chamonix](#)

[Penulis Indonesiana - Selasa, 22 September 2026 09:13 WIB](#)

[Di atap Pegunungan Alpen ini, keheningan menjelma menjadi sebuah zat yang padat, sebuah kehadiran purba yang menyelimuti hamparan salju abadi....](#)





[Mahasiswa_penulis](#)

[Apakah ASEAN akan Dibiarkan Jadi Pasar Digital China?](#)

[Mahasiswa_penulis - 19 jam lalu](#)

[ASEAN membutuhkan teknologi, tetapi juga membutuhkan ruang untuk membangun teknologinya sendiri....](#)



[Akun Publishhh](#)

[Penulis Indonesiana](#)

[Usaha Laris tapi Tetap Rugi?](#)

[Penulis Indonesiana - 2 hari lalu](#)

[Dagangan ramai tapi uang cepat habis? Bisa jadi ada kebocoran biaya harian. Ini tiga langkah sederhana mengatur keuangan usaha agar untung....](#)



[Indrian S. Fauzi \(aa Rian\).](#)

[Identity: Zuhur al-Qalam.](#)



[khas dan jawaban untuk mencapai dan menggemblakan itu semua....](#)



[Badrusalam Tgs](#)

[Penulis Indonesiana](#)

[People, Planning, Performance: Perencanaan SDM untuk Efektivitas Organisasi](#)

[Penulis Indonesiana - 20 jam lalu](#)

[Sumber daya manusia merupakan salah satu komponen utama dalam menentukan keberlangsungan sebuah organisasi....](#)



[Bihar Hikam Ahmadi](#)

[Penulis Indonesiana](#)

[1.704 Orang, 123 Universitas, 13 Negara: Jejak Satu Tahun OmicsLite](#)

[Penulis Indonesiana - 1 hari lalu](#)





[Boas Sababang](#)

[Penulis Indonesiana](#)

[UMKM Pantai Sepanjang Menghadapi Musim Sepi,
Digitalisasi Jadi Pilihan](#)

[Penulis Indonesiana - 1 hari lalu](#)

[Di Pantai Sepanjang, UMKM tumbuh bersama
wisatawan, solidaritas warga, dan harapan ekonomi
berkelanjut...](#)



[Indrian S. Fauzi \(aa Rian\)](#)

[Identity: Zuhur al-Qalam.](#)

[Eksplorasi Semut Berbadan Manusia dengan Ambisi
Demi Umat](#)

[Identity: Zuhur al-Qalam. - 19 jam lalu](#)

[Maka persiapkan dahulu pondasi ekonomi, ilmu dan
support system yang kuat bila benar ingin
mendedikasikan diri demi umat!...](#)





[Penulis Indonesiana](#)

[Tak Hanya Demi Hiburan, Game Moba Ini Ternyata Dapat Mengasah Hal-Hal Berikut!](#)

[Penulis Indonesiana - 1 hari lalu](#)

[Ternyata tidak selalu negatif, hal-hal positif ini dapat ditemukan pada saat bermain game seluler!...](#)



1

Tutup Iklan X

Informasi

[Ketentuan Konten](#) [Q&A Seputar Indonesiana.id](#) [Ketentuan Layanan](#) [Kebijakan Privasi](#)

Jaringan Media

[TEMPO.CO](#) [Koran Tempo](#) [Majalah Tempo](#) [Tempo English Magazine](#) [TEMPO.CO English](#) [Tempo Store](#) [Tempo Institute](#)

[Home](#) [Analisis](#) [Catatan Dari Palmerah](#) [Fiksi](#) [Hiburan](#) [Humaniora](#) [Sport](#) [Pendidikan](#)

Sosial Media



Download
Aplikasi Tempo



Mulai Menulis

